

<http://dx.doi.org/10.25157/ja.v11i1.14122>

Tinjauan Historis Implikasi Nasionalisasi Perusahaan Perkebunan Karet di Sumatera Utara Tahun 1958-1960

Reni Royani¹, Aprilia Triaristina², Risma Margaretha Sinaga³

^{1,2,3} Universitas Lampung, Indonesia

E-mail Koresponden: reniroyani027@gmail.com

Article history: Submit 2024-04-01, Accepted 2024-04-24, Published 2024-04-24

Abstrak

Nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia memiliki Implikasi terhadap Perusahaan perkebunan karet di wilayah Sumatera Utara pada tahun 1958-1960. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implikasi nasionalisasi perusahaan perkebunan karet di Sumatera Utara Tahun 1958-1960. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian historis dengan empat langkah penelitian yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan kepustakaan. Kemudian analisis data dilakukan menggunakan cara analisis data historis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nasionalisasi perusahaan perkebunan karet membawa perubahan baik dari sisi internal maupun eksternalnya. Dari segi internalnya terjadi perubahan pada manajemen perusahaan, kebijakan perusahaan dan hasil produksi. Pada sisi eksternalnya terjadi perubahan pada penanaman modal perusahaan perkebunan karet. Perubahan-perubahan yang terjadi pasca nasionalisasi ini memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi perusahaan tersebut untuk kedepannya.

Kata Kunci: Nasionalisasi perusahaan, Perkebunan Karet, Sumatera Utara

Abstract

The nationalization of Dutch Companies in Indonesia had implications for rubber plantations in the North Sumatra region. This research aims to determine the implications of company nationalization for rubber plantation companies in North Sumatra in 1958-1960. The research method used in this research is historical. With four research steps, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The data collection techniques used are documentation and literature. The data analysis was carried out using historical data analysis methods. The result of this research shows that the nationalization of rubber plantation companies brought changes both internally and externally. Internally there were changes in company management, company policies, and production results. On the external side, there have been changes in investment in rubber plantation companies. The changes that occurred after nationalization have had a social economic impact on these companies in the future

Keywords: Company Nationalization, Rubber Plantation, North Sumatra.

PENDAHULUAN

Pemerintahan Indonesia pada awal tahun 1950-an ditandai dengan adanya perbedaan keinginan dan realita yang dihadapi oleh masyarakat. Masyarakat pada saat itu menginginkan sebuah

negara yang merdeka dan mandiri dalam hal ekonomi dan pemerintahan, namun faktanya kemerdekaan Indonesia masih dibayang-bayangi oleh penjajahan yang dilakukan oleh bangsa barat. Hingga tahun 1952 Belanda masih menguasai

aktivitas perdagangan internasional. Delapan perusahaan Belanda yang ada masih menguasai impor barang konsumsi di Indonesia. Termasuk salah satunya di sektor perbankan yang masih dikuasai oleh tujuh bank asing tiga diantaranya merupakan milik Belanda. Pada tahun 1952-1953 kaum pribumi hanya menguasai 19% dari modal di sektor non-pertanian, selebihnya adalah milik asing. Total transfer keuntungan yang dikirim ke Belanda pada tahun 1953 sebanyak Rp 499 juta. Keadaan yang demikian tersebut menjadi sukar untuk diterima oleh para tokoh pergerakan nasional. Kemerdekaan tidak ada artinya apabila bangsa asing masih menguasai sebagian sumber ekonomi di Indonesia. Meskipun secara politik Indonesia telah merdeka, namun secara ekonomi Indonesia masih terjajah (Wardodjo, 2018). Aksi mogok kerja yang dilakukan oleh para buruh perkebunan mengawali proses nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia. Mogok kerja ini dilakukan selama 24 jam terhadap perusahaan-perusahaan Belanda pada tanggal 1 Desember 1957. Tindakan ini memicu terjadinya aksi nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda secara besar-besaran (Angin, 2017).

Nasionalisasi perusahaan perkebunan terjadi pada tahun 1958 dengan dikeluarkannya UU no.86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Hindia Belanda. Tujuan dari nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia adalah untuk memperoleh keuntungan negara dalam rangka pembangunan ekonomi nasional yang tentunya akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia. Nasionalisasi perusahaan Belanda dilakukan baik di pusat

perusahaan tersebut maupun di cabangnya (Wasino, 2016). Secara bertahap implementasi nasionalisasi perusahaan milik Belanda dilakukan. Dimulai pada tahun 1958 dengan menasionalisasikan perusahaan pertanian dan perkebunan di wilayah Sumatera dan Jawa, kemudian dilanjut dengan beberapa perusahaan di berbagai bidang yaitu bidang perdagangan, perindustrian dan tambang, perbankan, listrik dan gas, dan bidang transportasi (Tricahyono, 2021)

Pada tahun 1950-an perkebunan karet memegang peranan penting bagi kehidupan masyarakat di wilayah Sumatera Utara. Banyak penduduk yang mengandalkan pekerjaan sebagai buruh perkebunan karet sehingga tanaman karet ini sangat memiliki peran besar bagi perekonomian penduduk. Di wilayah Sumatera Utara sendiri sudah berdiri banyak konsesi-konsesi perkebunan karet yang dimiliki oleh para pengusaha Belanda. Adanya perkembangan industri otomotif membuat pemerintah Indonesia beranggapan bahwa kebijakan nasionalisasi perusahaan perkebunan karet menjadi sangat penting untuk dilakukan mengingat kondisi lahan memiliki potensi yang besar bagi perkembangan perekonomian Indonesia apabila dikelola dengan baik. Pemerintah Indonesia berharap bahwa proses nasionalisasi Perusahaan Perkebunan Karet Sumatera Utara dapat meningkatkan nilai jual karet alam Indonesia karena melalui proses nasionalisasi pemerintah akan melakukan perubahan dan perbaikan dalam tubuh perusahaan perkebunan karet (Ghani, 2019).

Nasionalisasi perusahaan perkebunan karet di Sumatera Utara menimbulkan implikasi atau dampak. Proses nasionalisasi yang terjadi telah

merubah tatanan atau struktur manajemen yang ada dalam tubuh perusahaan perkebunan milik Belanda tersebut. Berdasarkan beberapa hal yang telah dijelaskan, maka untuk itu peneliti memutuskan untuk mengkajinya dalam penelitian dengan judul Tinjauan Historis Implikasi Nasionalisasi Perusahaan Perkebunan Karet di Sumatera Utara Tahun 1958-1960. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakan implikasi nasionalisasi perusahaan belada pada perkebunan karet di wilayah Sumatera Utara tahun 1958-1960?. Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat kebijakan nasionalisasi perusahaan perkebunan karet di Sumatera Utara dapat merubah tatanan manajemen perkebunan dan mempengaruhi sejarah perkebunan karet di Indonesia.

Implikasi adalah segala sesuatu yang dihasilkan akibat adanya proses kebijakan. Hal ini berarti bahwa implikasi merupakan konsekuensi yang ditimbulkan setelah dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu. Silalahi berpendapat bahwa implikasi adalah sebagai akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program yang dapat bersifat baik ataupun bersifat tidak baik terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program tersebut (Mutiarani dkk., 2019). Dalam penelitian ini, implikasi dari kebijakan nasionalisasi dapat dilihat dari tiga bidang yaitu manajemen perusahaan, kebijakan perusahaan, hasil produksi, dan sistem penanaman modal.

Nasionalisasi memiliki makna yang cukup spesifik jika dilihat dari segi hukum. Erades mengemukakan bahwa nasionalisasi merupakan suatu peraturan yang berisi mengenai perubahan hak-hak

yang dimiliki secara perorangan atau kelompok menjadi milik negara. Sementara S. Gautama memaparkan bahwa nasionalisasi merupakan peralihan hak dari milik swasta menjadi milik negara yang dilakukan secara paksa (Wasino, 2016). Nasionalisasi perusahaan perkebunan karet di Indonesia dilakukan pada tahun 1958. Hal ini di latar belakang beberapa faktor salah satunya adalah karena pada saat itu karet menjadi suatu komoditi unggulan dalam perkembangan industrialisasi di dunia. Pada abad ke-20, karet menjadi komoditi yang paling dicari di pasar internasional. Perdagangan luar negeri didominasi oleh beberapa tanaman yaitu tanaman karet mentah, heath perca, getah jeletung, dan getah hang hang (Utama dkk., 2020).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah atau historis. Dalam proses penelitian sejarah, peneliti melakukan penelitian dengan mengacu kepada empat tahap penelitian sejarah yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pada penelitian ini peneliti melakukan kegiatan heuristik dengan mencari arsip-arsip sejarah berupa laporan-laporan serta surat-surat, serta surat kabar yang berkaitan dengan topik penelitian yakni mengenai Implikasi nasionalisasi perusahaan pada perusahaan perkebunan karet khususnya implikasi pada bidang manajemen perusahaan, hasil produksi, dan kebijakan perusahaan pada rentang waktu 1958-1960. Kemudian selanjutnya pada tahap kritik, peneliti melakukan kritik baik secara internal maupun secara eksternal

terhadap sumber-sumber sejarah yang telah ditemukan. Kegiatan interpretasi dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam baik secara analisis maupun secara sintesis. Arsip-arsip berupa arsip tekstual kementerian PPN, arsip AVROS, dan Arsip Jaarverslag perusahaan perkebunan karet peneliti analisis dan kemudian disintesis dengan arsip surat kabar sezaman yang berkaitan dengan topik penelitian. Kemudian pada tahap akhir penelitian, peneliti melakukan penulisan sejarah atau historiografi mengenai implikasi nasionalisasi perusahaan perkebunan karet di Sumatera Utara Tahun 1958-1960.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan kepustakaan. Teknik dokumentasi dilakukan pada saat tahap heuristik yakni dengan mencari sumber-sumber sejarah baik berupa sumber primer maupun sumber sekunder. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti menemukan beberapa arsip yakni arsip AVROS, arsip dari kementerian pertanian tentang rencana operasi konsesi sungei Pendjara yang berada di wilayah Langkat Sumatera Utara, serta arsip-arsip sezaman lainnya. Kemudian selanjutnya teknik yang digunakan adalah teknik kepustakaan. Teknik kepustakaan dilakukan dengan mencari dan menganalisis literatur-literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

Kemudian pada tahap analisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis data historis. Teknik analisis data historis adalah cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan kesimpulan sementara dari data yang telah diperoleh melalui pendekatan-pendekatan historis (Rahman, 2017).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implikasi Pada Manajemen Perusahaan Pasca Nasionalisasi

Kebijakan nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1958 membuat para pengusaha Belanda tunduk sepenuhnya terhadap aturan yang berlaku. Administratur perkebunan karet memberikan respon cepat terhadap kebijakan tersebut.

“The nationalisatie achten wij, evenals de onder beheerstelling in strijd mat het volkenrecht wegens haar discriminerend karakter wij zullen niet nalaten alle metrogelen te nemen, welke diensting geacht worden om de belangen van de aandelhouders te verdedigen en vergeding veer de geleden schade en de onteigening te verkrijgen. Sedert het vertrak van de administrateur hebben niets meer van de onderneming vernemen” (Arsip Jaarverslag, 1958).

“de anti-nederlandzhe campagne, welke in december overwachts ernstige vormen aannam, heeft fundamentele wijzignigen meegerbracht in de gang van zaken. Bij regeringsverordening werden de meeste Nederlandse bedrijven onder toezicht geplaatst of onder beheer gesteld. Bij cultuur-Maatschappijen had het laatste plaats en dit bracht mede, dat het beheer door de administrateur zou moeten worden overgedragen aan Indonesische employé's, daartoe aangewezen door een nieuw ingesteld regering lichaam de P.P.N Baru, dat verantwoording schuldig is aan de Minister van Landbouw (Arsip Jaarverslag, 1957).

Kampanye anti Belanda yang terjadi pada bulan Desember 1957 membawa perubahan yang besar bagi perusahaan Perkebunan karet Perusahaan di tempatkan di bawah administrasi Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) Baru yang bertanggung jawab kepada menteri pertanian.

Nasionalisasi perusahaan perkebunan menandai adanya perubahan manajemen perusahaan pada perusahaan perkebunan Karet. Perubahan ini dapat dilihat dari perubahan struktur organisasi perusahaan tersebut. Dalam arsip yang telah ditemukan, dapat di analisis bahwa sebelum adanya nasionalisasi perusahaan Belanda, perusahaan perkebunan karet di wilayah Sumatera Utara dikuasai oleh pengusaha Belanda. Perusahaan tersebut memang telah menguasai perkebunan karet di daerah Langkat. Sebelum dinasionalisasikan struktur manajerial pada perusahaan ditempati oleh orang-orang berkebangsaan Belanda yang terdiri atas komisaris, direktur, administrator, dan asisten administrator. Sementara orang-orang pribumi tidak memiliki hak untuk menempati posisi manajerial perusahaan, mereka hanya di tempatkan sebagai buruh atau kuli perkebunan dan buruh pabrik. Kemudian setelah adanya kebijakan nasionalisasi perusahaan Belanda, orang-orang berkebangsaan Belanda mulai meninggalkan Indonesia dan perusahaan diambil alih oleh pemerintah dan di tempatkan di bawah naungan Pusat Perkebunan Negara (PPN) cabang Medan. Hal ini sejalan dengan apa yang dipaparkan dalam sebuah jurnal karya Ririn Darini dan Miftahudin tahun (2018) bahwa dalam bidang perkebunan, setelah berlakunya kebijakan nasionalisasi perusahaan pabrik-pabrik yang pada awalnya dikelola secara terpisah, akhirnya digabungkan dalam satu manajemen di bawah naungan PPN Baru (Perusahaan Perkebunan Negara Baru) .

Pemindahan kekuasaan ini menjadi satu momen yang sangat penting, karena disini kita dapat melihat bahwasannya negara Indonesia mulai menunjukkan jati

dirinya sebagai sebuah negara yang merdeka dan ingin terlepas dari bayang-bayang perekonomian kolonial. Indonesia akan membentuk suatu perekonomian nasional yang mandiri. Para administrator perkebunan karet tidak bisa berbuat banyak ketika kebijakan nasionalisasi perusahaan Belanda di implementasikan. Para administrator hanya bisa mengikuti perintah atasannya untuk menyerahkan perkebunan karet ke tangan Pusat Perkebunan Negara (PPN) Baru. Kemudian para administrator perkebunan mulai meninggalkan daerah perkebunan seiring dengan proses pengembalian orang-orang Belanda ke negara asalnya. Hal ini membuktikan bahwasannya Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia memiliki dasar hukum yang sangat kuat sehingga para pengusaha Belanda tidak dapat berkutik terhadap isi Undang-Undang nasionalisasi perusahaan Belanda.

Struktur kepengurusan pada perusahaan perkebunan karet Sumatera Utara kini diisi oleh orang-orang pribumi. Hal ini tentunya berdampak baik bagi masyarakat pribumi karena Masyarakat pribumi memiliki kesempatan untuk bekerja dalam struktur manajerial perusahaan. Tidak seperti saat dikuasai oleh pemerintah Belanda dimana bangsa pribumi hanya dijadikan sebagai kuli perkebunan yang melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar baik di perkebunan maupun di pabrik karet. Proses Nasionalisasi Perusahaan menandai dimulainya proses sejarah perkebunan oleh tangan pemerintah Indonesia sendiri. Sehingga maju atau mundurnya perkebunan ini nantinya bergantung kepada kebijakan dan pengelolaan perkebunan kedepan.

Implikasi pada Kebijakan Perusahaan Pasca Nasionalisasi

Pasca dinasionalisasikan perusahaan perkebunan Karet berupaya untuk meningkatkan produksi karet melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh PPN. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pembangunan Angkatan Buruh

Setelah nasionalisasi Perusahaan Belanda, PPN membangun Angkatan buruh. Angkatan buruh ini nantinya akan dipekerjakan sebagai kuli perkebunan dan kuli pabrik yang mengelola getah-getah karet. Getah-getah karet yang telah di deres kemudian akan diangkut ke pabrik pengolahan untuk kemudian dikelola hingga siap jual dan di ekspor ke luar negeri. Untuk membangun angkatan buruh yang besar harus ada kurang lebih 120 keluarga yang menetap di perkebunan tersebut. Sementara itu, untuk pekerjaan rehabilitasi dan persiapan untuk penanaman tanaman karet baru tahun 1960 sedang dikerjakan oleh buruh kampung setempat yang melaksanakan kerja Borongan di perkebunan. Sebanyak 25 buruh dari kampung telah bekerja mulai tanggal 29 Februari 1960 (Arsip Avros, 1959).

Setelah dilakukannya nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia terjadi perubahan pada sistem buruh. Pada masa ini buruh di kendalikan oleh tentara yaitu dengan dibentuknya Dewan Perusahaan di Perusahaan-perusahaan yang diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mencegah diambilnya perusahaan bekas Belanda oleh para buruh perkebunan. Pada tahun 1960 dikeluarkan Peraturan Penguasa Perang tertinggi No. 4 Tahun 1960 tentang Pencegahan Pemogokan dan Penutupan

di Perusahaan atau Jawatan dan badan-badan Vital. Hal ini seperti yang tertuang dalam arsip yang ditemukan oleh peneliti.

“Barangsiapa yang melakukan atau turut melakukan pemogokan atau penutupan (*lock-out*) di perusahaan-perusahaan, jawatan-jawatan dan badan-badan yang dengan Keputusan Penguasa Perang dianggap vital, dihukum dengan hukuman seperti yang dimaksudkan dalam pasal 48 peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 23 Tahun 1959 tentang keadaan bahaya, ialah hukuman kurungan selamalamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah” (Arsip Kementrian Penerangan, 1960).

2. Pembangunan Perumahan Buruh

Sejalan dengan kebijakan perusahaan untuk membangun angkatan buruh, maka diperlukan perumahan-perumahan untuk menampung para buruh perkebunan. Perumahan ini penting untuk di bangun karena akan menjadi tempat tinggal para buruh perkebunan. Perumahan buruh di bangun secara modern dengan harapan buruh perkebunan merasa nyaman dan dapat hidup dengan sejahtera. Hal ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang no. 14 tahun 1958 pasal dua yang berisi bahwa daerah-daerah diberi urusan mengenai kesejahteraan buruh. Adapun bentuk kesejahteraan itu yaitu dengan memberikan bantuan dalam penyelenggaraan asrama atau perumahan buruh, memberikan bimbingan, dan kursus-kursus keterampilan bagi buruh.

“...perumahan baru untuk 18 keluarga yang sekarang ditempati oleh seorang overseer, seorang mandor, dan 16 orang buruh deres tatap yang menderes tanaman baru. Selama tahun 1960 sedang di rantjangkan untuk mendirikan perumahan tambahan...” (Arsip Avros, 1959).

Adapun gambar perumahan yang di bangun tuk para buruh perkebunan adalah sebagai berikut ini



(Sumber: (Arsip Foto AVROS, 1959a).

Gambar 1. Perumahan untuk para buruh perkebunan.

Karena perumahan buruh ini terletak di tengah-tengah perkebunan karet maka rancangan bangunannya dibuat dengan bentuk rumah panggung yang tidak menyentuh tanah dengan tujuan untuk mencegah masuknya Binatang buas seperti ular dan harimau ke dalam rumah.

3. Penanaman Karet

Untuk menunjang produktivitas perkebunan, maka dilakukanlah penanaman-penanaman karet baru. Sebelum itu, dilakukan pemusnahan terhadap tanaman-tanaman karet yang telah tua dan tidak mampu untuk

memproduksi getah karet lagi. Pemusnahan karet dilakukan dengan memberikan racun sodium arsenite pada pohon-pohon karet yang akan dimusnahkan. Cara ini dianggap paling efektif dan aman untuk dilakukan karena akan memberikan hasil karet yang bermutu tinggi dalam tanaman baru. Pohon-pohon karet yang telah ada kemudian dilakukan penyadapan (deres) dengan sistem deres yang modern (Arsip Avros, 1959). Pabrik pengolahan tanaman karet Perusahaan perkebunan karet di Sumatera Utara dapat di lihat melalui gambar di bawah ini.



(Sumber: Arsip Foto AVROS, 1959b).

Gambar 2. Tempat produksi Karet Perusahaan Sungei Pendjara Sumatera Utara

Berbagai macam getah karet yang dihasilkan kemudian diolah dengan peralatan modern untuk menghasilkan getah export yang layak jual dan berkualitas tinggi. Sistem deresan baru menggunakan bukaan normal dengan tinggi bukaan sebesar 2,80 m. Sistem bukaan ini telah menjadi standar bagi perkebunan karet di wilayah Semenanjung Malaya.

Implikasi Hasil Produksi Karet Pasca Nasionalisasi

Pengambilan kebijakan yang tepat pada perusahaan perkebunan karet di Sumatera Utara tentunya akan memberikan dampak yang sangat baik terutama dalam hal produktivitas tanaman karet pada perusahaan ini. Adapun hasil produksi karet pada tahun

1959 merupakan hasil dari tanaman pada tahun-tahun sebelumnya.

Pemerintah Indonesia selalu mengupayakan respon untuk menghadapi tantangan dan mendorong Indonesia untuk maju serta memiliki peradaban yang berada di atas. Dalam hal ini pemerintah melakukannya dengan cara pembangunan nasional terutama di bidang perkebunan karet dengan cara memperluas lahan tanaman karet untuk meningkatkan produktivitas tanaman karet. Peningkatan produktivitas tanaman karet tentunya akan meningkatkan hasil penjualan apabila kebutuhan karet di pasar mengalami peningkatan. Untuk wilayah Sumatera Utara sendiri terjadi peningkatan penjualan karet dari tahun 1959 ke tahun 1960.

Tabel 1. Hasil Produksi Karet Sumatera Utara

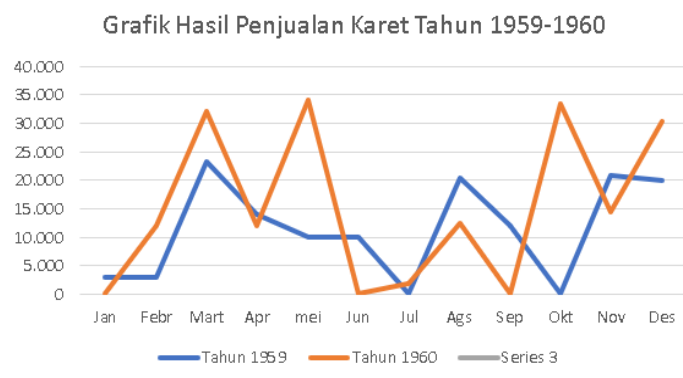
	Jumlah		Jumlah sesuai dengan Kas
	Kg	Rp	
Tahun 1959			
Jumlah	141.680	3.739.062	3.752.562
Tahun 1960			
Jumlah	183.670	5.523.140	5.652.480

(Sumber: Arsip Kementerian Pertanian, 1960).

Jika melihat secara umum hasil produksi perkebunan karet di wilayah Sumatera Utara, ini mencapai angka yang cukup besar. Hasil produksi karet pada tahun 1959 mencapai 141.680 kg dengan keuntungan mencapai Rp. 3.752.562. Kemudian meningkat pada tahun 1960 mencapai 183.670 kg dengan keuntungan sebesar Rp. 5.652.480. Karet-karet hasil produksi perkebunan Karet di Sumatera Utara ini dijual kepada beberapa perusahaan diantaranya yaitu PT Andalas, PT ASDA, PT Sumber Baru, dan Mahroezar (Arsip Kementerian

Pertanian, 1960). Melihat data hasil produksi karet tersebut, kita dapat memahami bahwasanya tindakan nasionalisasi perusahaan ini merupakan tindakan yang tepat dari pemerintah Indonesia. Karena banyak perkebunan-perkebunan milik para pengusaha Belanda yang tidak terurus akibat perang kemerdekaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Pendapatan dari sektor perkebunan akan menambah devisa negara Indonesia dan dapat berguna untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.

Peningkatan hasil produksi karet tersebut dapat dilihat melalui grafik berikut:



(Sumber Olah Data Penelitian)

Gambar 3. Grafik Penjualan Karet 1959-1960

Dari grafik diatas menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan penjualan karet dalam rentang tahun 1959-1960. Dapat dilihat pada garis grafik yang berwarna jingga posisi grafiknya lebih tinggi dibandingkan dengan garis grafik yang berwarna biru. Hal ini menunjukkan bahwa hasil penjualan karet pada tahun 1960 lebih tinggi dibandingkan dengan hasil penjualan karet pada tahun 1959. Nasionalisasi Perusahaan Perkebunan Karet berdampak pada peningkatan hasil produksi karet.

Sistem Penanaman Modal Pasca Nasionalisasi

Pasca dilakukanya nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia kendali kebijakan perusahaan perkebunan berada di bawah naungan Pusat Perkebunan Negara (PPN). Dalam pengoperasian perkebunan PPN memiliki modal yang diberikan oleh negara untuk mengurus perkebunan. Hal ini dapat dilihat dari peraturan pemerintah Indonesia tentang Pembentukan Pusat Perkebunan Negara.

“Dalam mengurus perkebunan, Pusat Perkebunan Negara (PPN) memiliki modal yang diberikan oleh pemerintah pada saat PPN didirikan, PPN juga

mendapat tambahan modal dari sisa uang kas yang terdapat dalam perusahaan serta uang pinjaman yang berasal dari bank atau masyarakat.” (Arsip Kementerian Penerangan RI, 1946).

Dampak kebijakan Nasionalisasi Perusahaan Belanda di bidang Penanaman Modal dapat dilihat pada hilangnya para investor asing yang berinvestasi di perusahaan bekas perkebunan Belanda yakni Perkebunan Karet. Setelah dilakukan nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia aturan mengenai sistem penanaman modal dan investasi diatur dalam Undang-Undang No 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing. Undang-undang ini mengatur sistem penanaman modal asing di Indonesia beserta hak, kewajiban, dan pembatasan untuk para investor asing.

SIMPULAN

Implikasi Nasionalisasi Perusahaan Perkebunan Karet di Sumatera Utara Tahun 1958-1960 dapat dilihat dari adanya perubahan baik dari dalam perusahaannya sendiri (internal) maupun dari luar perusahaan (eksternal). Dari

dalam perusahaan, terjadi perubahan dalam beberapa aspek yakni perubahan pada manajemen perusahaan, perubahan pada kebijakan perusahaan, dan perubahan pada hasil produksi. Aspek-aspek ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Perubahan pada internal perusahaan menimbulkan dampak. Dampak sosial nya adalah hilangnya dominasi kekuasaan kaum kolonial Belanda pada posisi manajerial perkebunan dan digantikan oleh dominasi kaum pribumi. Ini merupakan dampak yang positif bagi para pekerja pribumi karena pada masa perkebunan ini masih dikuasai oleh Belanda, kaum pribumi hanya bekerja sebagai buruh penyadap karet di perkebunan. Terjadinya perubahan pengelola perkebunan melahirkan sebuah kebijakan bagi perusahaan dan mempengaruhi hasil produksi perkebunan karet di wilayah Sumatera Utara. Kemudian dari dampak ekonominya, nasionalisasi perusahaan perkebunan karet membawa perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik. Kemudian perubahan eksternal pada perusahaan Perkebunan Karet di wilayah Sumatera Utara dapat dilihat melalui perubahan kepemilikan modal dan pembatasan modal asing untuk berkembang di sektor perkebunan. Hal ini dikarenakan pemerintah pada saat itu sedang mengembangkan pemodal dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Angin, C. O. P. (2017). *Nasionalisme di Perusahaan Nasionalisasi Menuju Profesionalisme Perusahaan BUMN Perkebunan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Arsip Avros. (1959). *Rencana Operasi Konsesi Sungei Pendjara dan Sungei Tampa*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

Arsip Foto AVROS. (1959a). *Gambar Perumahan untuk Para Buruh Perkebunan*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

Arsip Foto AVROS. (1959b). *Gambar Tempat Produksi Karet Perusahaan Sungei Pendjara Sumatera Utara*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

Arsip Jaarverslag. (1957). *Jaarverslag Holland Langkat Rubber Maatschappij*. Amsterdam: Digital Collection Universitas Leiden.

Arsip Jaarverslag. (1958). *Jaarverslag Holland Langkat Rubber Maatschappij 1958*. Amsterdam: Digital Collection Universitas Leiden.

Arsip Kementrian Penerangan. (1960). *Peraturan Penguasaan Perang Tertinggi No. 4 Tahun 1960*. Jakarta: Kementrian Penerangan dan Persediaan.

Arsip Kementrian Penerangan RI. (1946). *Undnag-Undang No. 4 Tahun 1946 Tentang Pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara*. Jakarta: Kementrian Penerangan RI.

Arsip Kementrian Pertanian. (1960). *Daftar Perincian Penjualan Karet*. Medan: Balai Penelitian RISPA Cabang Medan.

Ghani, M. A. (2019). *Jejak Planters di tanah Deli*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.

Mutiarani, R., Amrazi, & Izhar. (2019). Implementasi dan Implikasi Full Day School Pada Pembelajaran Sosiologi di SMAN10 Pontianak. *Jurnal Pendidikan dan*

Royani, R., Triaristina, A., Sinaga, R.M. (2024). Tinjauan Historis Implikasi Nasionalisasi Perusahaan Perkebunan Karet di Sumatera Utara Tahun 1958-1960. *Jurnal Artefak*, 11 (1), 75-86

Pembelajaran Khatulistiwa, 8(3), 1–8.

Rahman, F. (2017). Menimbang Sejarah Sebagai Landasan Kajian Ilmiah sebuah Wacana Pemikiran dalam Metode Ilmiah. *el-Banat Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 7(1), 129–150.

Tricahyono, D. (2021). Meniti Jalan Nasionalisasi Aset Perusahaan Belanda di Indonesia: Menguntungkan atau Merugikan. *Jurnal Crikestra Jurnal Pendidikan Sejarah*, 10(2), 98–113.

Utama, E. J. P., Utami, N. E., Wibowo, B., & Chaya Riska. (2020). Perkebunan Karet di Siantang Pada Awal Abad ke-20. *Junral Ilmiah Kependidikan*, 13(2), 183–196.

Wardodjo, W. W. (2018). Ekonomi Indonesia 1950-an dan Penguasaan Negara terhadap Perusahaan Kereta Api Pasca KMB 1949. *Indonesian Historical Studies*, 2(2), 96–106.

Wasino. (2016). nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Asing Menuju Ekonomi Bedikari. *Jurnal Paramita*, 26(1), 62–71.

Royani, R., Triaristina, A., Sinaga, R.M. (2024). Tinjauan Historis Implikasi Nasionalisasi Perusahaan Perkebunan Karet di Sumatera Utara Tahun 1958-1960. *Jurnal Artefak*, 11 (1), 75-86